

THE ROLE OF DATUK EMPAT SUKU IN SYSTEM OF ROYAL GOVERNMENT OF SIAK 1723-1945

Syafitri Ariyani*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si**, Drs. Ridwan Melay, M.Hum***
Email:Syafitri_ariyani@yahoo.com, isjoni@yahoo.com, Ridwanmelay@yahoo.com
CP : 081378423277

**Social Science Departement
History Education FKIP-University Of Riau**

Abstrak : *Kingdom of Siak is a kingdom which located at one of cities in Riau Province, it's Siak Regency. Kingdom of Siak has been there even before and after the England and Colonial take over until Indonesia's independence era. Kingdom of Siak was built by Raja Kecik who titled Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah in 1723. The historiography about the Kingdom of Siak isn't only talk about its growth and expansion processes, but, history was also recorded its ups and downs as well as their prominent characters who took the role in Kingdom of Siak's era. By writing about the characters who have struggled, we expected people could know and respect how the struggle they've been through, as well as the role of this four Datuks which called by Datuk Empat Suku, such as Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Kampar, and Datuk Pesisir. The four Datuks were Sultan's confidants who appointed as Kingdom Councils and responsible to set the wheels of Kingdom of Siak's government. This research purposes are: (1) To know more about Datuk Empat Suku, (2) To know the role of Datuk Empat Suku in Kingdom of Siak's government system, (3) To know the efforts that were made by Datuk Empat Suku to set the wheels of Kingdom of Siak's government, (4) To know the role of Datuk Empat Suku after the Kingdom's Council was abolished and the Kingdom joined Republic of Indonesia. This research was conducted by historical method. The data were derived from literature studies and interviews. The research started from submission of the proposal title until the last revision of author's research. The research's result showed that Datuk Empat Suku as Kingdom's Councils, have important role to the sustainability of the development of the Kingdom's government system, so Datuk Empat Suku's presence never been abolished from the Kingdom's government structure until the last Sultan, who is Sultan Syarif Kasim II.*

Keywords: *Role, Datuk Empat Suku, Governments, Kingdom Siak*

PERANAN DATUK EMPAT SUKU DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN SIAK TAHUN 1723-1945

Syafitri Ariyani*, Prof. Dr. Isjoni, M.Si**, Drs. Ridwan Melay, M.Hum***
 Email: Syafitri_ariyani@yahoo.com, isjoni@yahoo.com, Ridwanmelay@yahoo.com
 CP : 081378423277

Program Studi Pendidikan Sejarah
 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
 Universitas Riau

Abstrak: Kerajaan Siak adalah kerajaan yang terdapat di salah satu daerah di Provinsi Riau tepatnya di Kabupaten Siak, Kerajaan Siak telah ada sebelum dan sesudah masuknya Kolonial Belanda dan Inggris hingga era kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Siak pertama kali didirikan oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1723. Penulisan sejarah mengenai Kerajaan Siak tidak hanya membahas proses tumbuh dan berkembangnya saja, sejarah juga mencatat peristiwa pasang surut yang dialami Kerajaan Siak, serta mengenai tokoh-tokoh yang banyak berperan dalam perjalanan Kerajaan Siak. Dengan penulisan mengenai tokoh yang telah berjaya, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menghormati bagaimana usaha yang telah ditempuh oleh para pejuang dalam perjalanan Kerajaan Siak, seperti halnya peran dari keempat datuk yang disebut dengan Datuk Empat Suku antara lain: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Kampar, dan Datuk Pesisir. Keempat datuk ini merupakan orang-orang kepercayaan sultan yang diangkat menjadi Dewan Kerajaan dan bertugas mengatur jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Siak. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengenal lebih dalam tentang Datuk Empat Suku (2) Untuk mengetahui peranan dari Datuk Empat Suku dalam system pemerintahan di Kerajaan Siak (3) Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan Datuk Empat Suku dalam mengatur jalannya roda pemerintahan di Kerajaan Siak (4) Untuk mengetahui peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan dihapuskan dan kerajaan bergabung dengan Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode sejarah atau historis. Data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan wawancara. Waktu penelitian dimulai dari pengajuan judul proposal sampai dengan revisi terakhir skripsi penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Datuk Empat Suku sebagai Dewan Kerajaan, sangat berperan penting terhadap keberlangsungan perkembangan sistem pemerintahan di Kerajaan Siak, sehingga keberadaan Datuk Empat Suku ini tidak pernah terhapuskan dari struktur pemerintahan di Kerajaan Siak, sampai pada sultan terakhir yaitu Sultan Syarif Kasim II.

Kata Kunci : Peranan, Datuk Empat Suku, Pemerintahan, Kerajaan Siak

PENDAHULUAN

Siak Sri Indrapura merupakan Ibu kota dari Kabupaten Siak yang terdapat di Provinsi Riau, perkembangan kota Siak tidak terlepas dari sejarah Siak itu sendiri. Dimana Siak dahulunya merupakan pusat dari Kerajaan Siak, hal ini dibuktikan dengan adanya Istana yang berdiri kokoh tepat di tengah-tengah kota Siak hingga saat ini yang merupakan icon kebanggaan Kabupaten Siak dalam bidang pariwisata.

Berdasarkan catatan sejarah Siak telah ada sebelum dan sesudah masuknya Kolonial Belanda dan Inggris sampai Indonesia merdeka.¹ Sejarah mengenai Kerajaan Siak tidak hanya membahas mengenai proses tumbuh dan berkembangnya saja, sejarah juga mencatat mengenai peristiwa pasang surut yang dialami Kerajaan Siak, sejak didirikan oleh Raja Kecil sampai pewaris tahta terakhir yaitu Sultan Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Saifuddin.

Pada tahun 1723 Masehi Raja Kecil membangun Kerajaan Siak yang beibukota di Buntan.² Setelah dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Siak, Raja Kecil melakukan konsolidasi dalam bidang pemerintahan, militer dan melakukan perbaikan perekonomian dengan melakukan hubungan dagang dengan baik. Raja kecil dalam menjalankan roda pemerintahan didampingi oleh Dewan Kerajaan yang terdiri dari orang-orang besar kerajaan. Dewan Kerajaan yang dimaksud adalah Datuk Empat Suku yang terdiri dari:

1. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa
2. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja
3. Datuk Kampar dengan gelar Sri Dewa Raja
4. Datuk Pesisir dengan gelar Maha Raja Sri Wangsa

Datuk-datuk tersebut sangat penting kedudukannya dalam Kerajaan Siak. Mereka merupakan Dewan Kerajaan yang mengatur jalannya roda pemerintahan serta sebagai penasihat sultan di Kerajaan Siak, mereka juga berhak mengangkat dan memberhentikan sultan. Kedudukan mereka diatur dalam undang-undang kerajaan Siak yang disebut dengan Babul Qawa'id yang artinya pintu segala pegangan.³ Karena besarnya jasa Datuk Empat Suku terhadap keberadaan Kerajaan Siak, Datuk Empat Suku tidak pernah dihapuskan dari struktur pemerintahan Kerajaan Siak hingga sampai pada sultan terakhir yaitu Sultan Syarif Kasim II.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan salah satu kerja untuk memahami suatu objek penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian ilmiah. Penulisan sejarah merupakan bentuk dan proses pengisahan atau peristiwa-peristiwa masa lalu umat manusia.⁴

¹. OK. Nizami Jamil, dkk. 2010. *Sejarah Kerajaan Siak*. Pekanbaru. Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau. Hal:24

².OK. Nizami Jamil, dkk. 2002. *Istana Asserayah Hasyimiah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Siak Sri Indrapura. BAPPEDA Kab. Siak dan Masyarakat Peduli Lingkungan Wisata Siak Sri Indrapura. :1

³..Marlaily Rahim Asmuni, dkk. 1986. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Investasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah . Pekanbaru. Hal: 22

⁴ Dudung Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. Hal: 16

Metode yang digunakan adalah metode sejarah atau historis. Sebuah metode yang disebut historis apabila penyelidikan ditunjukkan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui sumber dokumen.⁵

Penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kabupten Siak. Adapun tempat yang dikunjungi yaitu, Istana Siak, LAM Kab. Siak, Dinas Pariwisata Kab. Siak, Perpustakaan Afrita Dara Kab. Siak, Puswil Dearah Riau.

Adapaun teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain: (1) Teknik Kepustakaan (2) Teknik Observasi (3) Teknik Wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Datuk Empat Suku

Sultan sebagai pemegang pucuk pemerintahan didampingi oleh Dewan Kerajaan. Dewan Kerajaan terdiri orang-orang besar kerajaan yang juga merupakan kepala suku yang mengurus dan mengatur sukunya masing-masing. Dewan kerajaan ini juga berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan dan penasehat utama sultan. Orang-orang besar ini disebut juga dengan Datuk Empat Suku yang terdiri dari, antara lain:

1. Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bijuangsa
 Pada masa pemerintahan Raja Kecil, yang menjadi Datuk Lima Puluh adalah Datuk Bebas. Beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya didaerah Lima Puluh Kota. Beliau bersama-sama dengan Raja Kecil datang dari Pagar Ruyung.
2. Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja
 Pada masa pemerintahan Raja Kecil yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah Datuk Syamsuddin, beliau berasal dari Sumatra Barat tepatnya didaerah Tanah Datar. Beliau juga bersama-sama datang bersama rombongan Raja Kecil dari Pagar Ruyung. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang menjadi Datuk Tanah Datar adalah M. Thohir, dan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II adalah Datuk Abdullah dengan gelar Sri Pekerma Raja Bujang Sayang dan bertugas sebagai kepala onder distrik Bangko.
3. Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja
 Pada masa pemerintahan Raja Kecil yang menjadi Datuk Pesisir pertama kali adalah Datuk Kasim, kemudian pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk M. Zen, pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Pesisir adalah Datuk Encik Sontel.
4. Datuk Kampar dengan gelar Maha Raja Sri Wangsa
 Dalam sejarah Kesultanan Siak Datuk Kampar pertama kalinya di angkat, setelah Raja Kecil dinobatkan menjadi sultan Siak. Namun sampai saat ini tidak diketahui siapa yang menjadi Datuk Kampar pertama kali pada saat itu, dikarenakan tidak adanya bukti tertulis. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk Haji Musfak, sedangkan pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kasim II yang menjadi Datuk Kampar adalah Datuk

⁵ Winarno, Surakhman. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito. Hal: 132.

Moh. Sholeh, kemudian diganti oleh Datuk Abdurrahman yang menajabat sebagai kepala onder distrik Dumai.⁶

Peranan Datuk Empat Suku Dalam Sistem Pemerintahan Kerajaan Siak

Adapun peranan yang di lakukan Datuk Empat Suku di dalam pemerintahan Kerajaan Siak antara lain:

1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Menteri) dan Penasehat Sultan

Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku didalam pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan admistrasi tertinggi. Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan. Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan. Sebagai Dewan Menteri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang

Pada masa pemrintaha Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak. Beliau juga membangun istana yang disebut Istana Asserayah Hasyimiah, Balairung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan. Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa'id atau Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undang-undang ini sultan di bantu oleh Datuk Empat Suku

Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.⁷

3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota.

Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku, Qodhi dan Controleur yaitu :

⁶ T. Mohammad , Toha. 2012. *Warisan Sejarah Kesultanan Siak Sri Indrapura" Dalam Untaian Kisah Mahkota di Sungai Jantan"*. KITLV Press: Siak Sri Indrapura :52

⁷ Jurnal Masrizal. *Sistem Peradilan Kerajaan Siak* (di akses pada tanggal 17 Oktober 2016)

1. Datuk Sri Bijuangsa (Kepala Suku Lima Puluh)
2. Datuk Sri Pekeraja (Kepala Suku Tanah Datar)
3. Datuk Sri Dewaraja (Kepala Suku Pesisir)
4. Datuk Amir Pahlawan (Kepala Suku Kampar)
5. Qodhi
6. Controleur

Balai Kerapatan Qodhi diberi nama Balairung, yakni tempat diselenggarakannya aktifitas peradilan, yang berkenaan dengan soal agama seperti Muamalat (perdata) maupun Jinayat (pidana).⁸

Usaha-Usaha Yang di Lakukan Datuk Empat Suku

Usaha-usaha yang dilakukan keempat Datuk ini merupakan perbuatan, tindakan, serta sikap yang dilakukan secara sadar dalam memperjuangkan serta mempertahankan eksistensi kejayaan Kerajaan Siak. meskipun dalam konteksnya Datuk Empat Suku ini melakukan sesuatu berdasarkan atas arahan dari sultan. Tergabungnya keempat datuk ini kedalam Dewan Kerajaan atau Dewan Menteri di dalam pemerintahan Kerajaan Siak, terlihat jelas bahwa usaha-usaha dari keempat datuk ini dalam mempertahankan keberjayaan Kerajaan Siak, sehingga peran Datuk Empat Suku ini tidak pernah dihapuskan selama berdirinya Kerajaan Siak, meskipun pasang surut yang di alami pemerintahan Kerajaan Siak.

Meskipun dalam mekanisme pelaksanaannya sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, namun dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan sultan membutuhkan bantuan dari keempat datuk ini, saran, masukan bahkan keputusanpun berdasarkan persetujuan dari keempat datuk ini secara musyawarah. Dalam pengangkatan sultanpun, Datuk Empat Suku yang berhak mengambil keputusan, manakah yang patut untuk menjadi penerus tahta di Kerajaan Siak, dan datuk-datuk ini pula berhak memberhentikan sultan apabila sultan lalai dalam menjalankan tugasnya. Meskipun pada dasarnya pembentukan Datuk Empat Suku ini sebagai Dewan Kerajaan di angkat oleh sultan.

Selain dari memilih dan memberhentikan sultan serta mengatur jalannya roda pemerintahan, keempat datuk ini bersama sultan berusaha membentuk suatu konstitusi ataupun undang-undang yang mengatur tentang aturan-aturan yang ada di Kerajaan Siak, yang disebut juga dengan Babul Qawa'id yang artinya pintu segala pegangan yang dicetak di Siak pada tahun 1901.⁹

Babul Qawa'id merupakan kitab undang-undang di Kesultanan Siak. Kitab setebal 90 halaman ini menguraikan tentang hukum yang dikenakan kepada orang Melayu maupun bangsa lain yang berhubungan dengan orang Melayu. Di dalam Babul Qawa'id dijelaskan bahwa bagian pertama Babul Qawa'id merupakan bagian pembukaan yang terdiri dan dua pasal dan menjelaskan tentang motivasi, latar belakang, nama dan naskah ini, dan menyebutkan bahwa isinya tidak berlaku sebagai hukum bagi penduduk bukan Melayu atau Melayu yang menjadi pegawai Pemerintah Hindia

⁸ Ardila Suwarno, dkk. 2005. *Siak Sri Indrapura*. Jakarta: Amanah-Lontar. Hal: 88

⁹ E. Netscher. (Penerjemah oleh Wan Ghalib) *Belanda di Johor dan di Siak 1602-1865*. 2002. hal :43

Belanda, kecuali yang terhibat perkara dengan orang Melayu. Pengadilan untuk kasus ini akan melibatkan pejabat Kesultanan Siak dan pejabat Pemerintah Hindia Belanda.

Peran Datuk Empat Suku setelah Dewan Kerajaan diHapuskan dan bergabung ke RI

Meskipun Dewan Menteri telah dihapuskan didalam system pemerintahan di Kerajaan Siak oleh Belanda. Namun dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sultan tetap memanfaatkan pembesar-pembesarnya. Sultan dalam hal ini tetap bermusyawarah dengan Datuk Empat Suku. Mereka merupakan pembesar kerajaan yang tidak dapat ditinggalkan oleh sultan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan, sekalipun keputusan terakhir berada ditangan sultan. Meskipun keberadaan Dewan Kerajaan tidak beralaku lagi, namun sultan tetap mempercayai keempat datuk tersebut dalam menguasai bidang-bidang tertentu seperti:

1. Datuk Lima Puluh menguasai masalah adat
2. Datuk Tanah Datar menguasai masalah pemerintahan
3. Datuk Pesisir menguasai masalah dalam negeri
4. Datuk Kampar menguasai daerah rantau/jajahan.¹⁰

Meskipun Dewan Kerajaan telah dihapus, sultan tetap mendekatkan dirinya kepada para pemebesarnya, ia memanfaatkan Balairung Sari yang dibangun pada tahun 1886 merupakan tempat kegiatan pemerintah dan sebagai tempat forum musyawarah dengan orang-orangnya. Balairung juga merupakan kantor kerapatan tinggi yang mengelola dan memecahkan masalah-masalah tindakan pidana sipil maupaun kriminal.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Datuk Empat Suku adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh raja Kerajaan Siak kepada empat orang pembesar kerajaan atas jasa dan kesetiaannya terhadap raja dalam membantu menjalankan roda pemerintahan di Kerajaan Siak. Adapaun empat orang pembesar kerajaan tersebut antara lain: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Kampar dan Datuk Pesisir.

Adapaun peranan dari Datuk Empat Suku tersebut antara lain:

1. Sebagai Dewan Kerajaan (Dewan Menteri) dan Penasehat Sultan
Dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang beralaku didalam pemerintahan di Kerajaan Siak, sultan adalah pemegang kedaulatan dan admistrasi tertinggi. Namun dalam menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan sultan memanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi fungsi dan

¹⁰. Tenas Effendi.1972. *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura*. Badan Pembina Kesenian Riau: Pekanbaru. Hal: 47

peranan kepada pemebesar-pembesar kerajaan. Sultan tetap bermusyawarah kepada Datuk Empat Suku sebelum mengambil suatu keputusan atau menentukan suatu kebijaksanaan, dalam hal keputusan dari datuk-datuk tersebut sangat diperlukan. Sebagai Dewan Mentri atau Dewan Kerajaan Datuk Empat Suku juga berhak mengangkat dan memberhentikan sultan, berdasarkan suatu pertimbangan dan mufakat apabila sultan melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

2. Membantu Sultan dalam membuat Undang-undang

Pada masa pemerintah Sultan Assyaidis Syarif Hasim Abdul Jalil Syaifuddin, beliau meneruskan modernisasi dalam bidang pendidikan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkaya kesultanan dengan mengeksplor hasil bumi Siak. Beliau juga membangun istana yang disebut Istana Asserayah Hasyimiah, Balaiung Sari atau Balai Kerapatan Tinggi setra membuat Undang-undang untuk mengatur hukum yang dikenakan pada masyarakat melayu dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam suatu perkara atau permasalahan. Undang-undang ini disebut juga dengan Babul Qawa'id atau Pintu Segala Pegangan. Dalam pembuatan undang-undang ini sultan di bantu oleh Datuk Empat Suku Menyatakan bahagian-bahagian denda dan sapu meja yang dapat dari tempat keadilan yang dilakukan oleh Kerapatan Tinggi dan Hakim Polisi Negeri Siak dan Hakim Polisi Jajahan.

3. Sebagai Hakim Kerapatan Tinggi

Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balai Kerapatan Tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak, Dewan Menteri dan dibantu oleh Kadi Siak serta Controleur Siak sebagai anggota. Pengadilan Tinggi berada di ibukota Kerajaan yang disebut Kerapatan Qodhi yang diketuai oleh Sultan, sedangkan hakim Anggota adalah datuk-datuk dari setiap suku Dengan besarnya jasa Datuk Empat Suku terhadap keberadaan Kerajaan Siak, Datuk Empat Suku tidak pernah terhapuskan dari struktur pemerintahan di Kerajaan Siak, hingga sampai pada sultan ke XII yaitu Sultan Syarif Qasim II sampai penyerahan Kerajaan Siak ke Republik Indonesia tahun 1945.

Rekomendasi

1. Dalam mempelajari sejarah perjuangan bangsa , tidak bersifat nasional saja, tetapi juag mempelajari sejarah loka yang terkandung didalamnya , karena dengan mempelajari seluruh perjuangan bangsa, kita mengetahui akan sejarah bangas kiat lebih mendalam
2. Dalam penelitians sejarah berikutnya tidak hanya mengenai took-tokoh pemimpin saja melainkan orang-orang yang turut membantu dalam menjalankan pemerintahan tesebut.
3. Diharapkan nilai-nilai perjuangn dari Datuk Empat Suku dapat dijadikan suri tauladan yang baik bagi kita.

4. Kepada generasi penerus supaya tetap memiliki jiwa nasionalisme seperti para pejuang-pejuang terdahulu.
5. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia di Riau sangat perlu dilestarikan dan dipelihara terutama yang mengandung nilai sejarah didalamnya.
6. Kepada tokoh-tokoh yang mengetahui peristiwa sejarah baik yang terlibat langsung maupun tidak, agar bias memberikan informasi berupa fakta yang sangat akurat dan otentik bagi penulis sejarah untuk memperkaya sejarah bangsa.
7. Untuk mahasiswa agar dapat meneruskan penelitian ini untuk penulisan sejarah serta mendalami konsep, dengan demikian sejarah akan mampu menjadi pedoman hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila Suwarno,dkk. 2005. *Siak Sri Indrapura*. Jakarta: Amanah-Lontar
- Dudung Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media.
- E.Netscher. (Penerjemah oleh Wan Ghalib) *Belanda di Johor dan di Siak 1602-1865.2002*
- Marlaily Rahim Asmuni, dkk. 1986. *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Riau*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Investasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Pekanbaru
- OK. Nizami Jamil, dkk. 2010. *Sejarah Kerajaan Siak*. Pekanbaru. Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau. 2002. *Istana Asserayah Hasyimiah Kerajaan Siak Sri Indrapura*. Siak Sri Indrapura. BAPPEDA Kab. Siak dan Masyarakat Peduli Lingkungan Wisata Siak Sri Indrapura
- Tenas Effendi.1972. *Lintasan Sejarah Siak Sri Indrapura*. Badan Pembina Kesenian Riau: Pekanbaru.
- Winarno, Surakhman. 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito

JURNAL

Marizal. 2015. *Jurnal Sistem Peradilan Kerajaan Siak*